

SELF VS. OTHER: MEDIA FRAMING JAKARTA POST TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA

**Salsabila Humaira¹, Siti Aliyuna Pratisti², Yulius Purwadi Hermawan³,
Nurul Husna⁴**

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas
Padjadjaran, Kota Bandung, Indonesia

³ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Katolik
Parahyangan, Kota Bandung, Indonesia

⁴ Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah & Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, Kota Banda Aceh, Indonesia

Email Korespondensi: salsabilahumaira13@gmail.com

Submitted: 15-01-2026; Accepted: 07-03-2026; Published : 16-03-2026

ABSTRAK

Krisis pengungsi Rohingya merupakan salah satu isu kemanusiaan paling kompleks di Asia Tenggara yang memicu perhatian luas dari media massa internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi pengungsi Rohingya dalam liputan daring *The Jakarta Post* sebagai media berbahasa Inggris di Indonesia dengan audiens global. Analisis ini menggunakan kerangka teoritis *Self and Other* dari Iver B. Neumann (1996) yang dipadukan dengan metode pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) model tiga level Norman Fairclough (1995), mencakup level teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Data analisis terdiri dari enam artikel *The Jakarta Post* periode 2020-2025 yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya terhadap lonjakan pengungsi Rohingya. Hasil analisis mengungkapkan adanya tiga pola diskursif utama dalam pembingkai berita. Pertama, Rohingya dikonstruksikan sebagai korban tragedi kemanusiaan melalui narasi trauma dan penderitaan fisik guna membangkitkan empati internasional. Kedua, narasi berkembang menjadi representasi Rohingya sebagai beban dan tantangan keamanan serta sosial-ekonomi bagi Indonesia, yang ditandai dengan munculnya wacana kejenuhan masyarakat lokal dan kriminalisasi melalui isu penyelundupan manusia. Ketiga, krisis ini direpresentasikan sebagai instrumen diplomasi dan politik internasional, di mana media mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam forum regional seperti ASEAN dan *Bali Process*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa liputan media tidak hanya menempatkan Rohingya sebagai "Other" yang rentan atau bermasalah, tetapi juga secara strategis membangun citra "Self" Indonesia sebagai bangsa yang humanis dan bertanggung jawab, sekaligus negara diplomatik yang pragmatis dalam menegosiasikan kepentingan nasional dan stabilitas regional di panggung global.

Kata kunci: Pengungsi Rohingya, *Self Vs. Other*, *Media Framing*, *The Jakarta Post*, *Critical Discourse Analysis*

ABSTRACT

The Rohingya refugee crisis represents one of the most complex humanitarian issues in Southeast Asia, garnering extensive attention from international mass media. This study aims to analyze the representation of Rohingya refugees in the online coverage of The Jakarta Post, an Indonesian English-language media outlet with a global audience. The analysis employs Iver B. Neumann's (1996) theoretical framework of Self and Other, integrated with Norman Fairclough's (1995) three-level model of Critical Discourse Analysis (CDA), encompassing the levels of text, discourse practice, and social practice. Data of analysis consists of six online articles from The Jakarta Post (2020-2025), selected through purposive sampling based on their relevance to the surge in Rohingya refugees. The findings reveal three primary discursive patterns in the news framing. First, the Rohingya are constructed as absolute victims of a humanitarian tragedy through narratives of

trauma and physical suffering designed to evoke international empathy. Second, the narrative evolves into a representation of the Rohingya as a security and socio-economic burden for Indonesia, characterized by the emergence of local social fatigue and the criminalization of the crisis through human trafficking issues. Third, the crisis is represented as an instrument of diplomacy and international politics, where the media reinforces Indonesia's position as a key actor within regional forums such as ASEAN and the Bali Process. The findings demonstrate that media coverage does not merely position the Rohingya as a vulnerable or problematic "Other", but also strategically constructs Indonesia's "Self" as a humanist and responsible nation, as well as a pragmatic diplomatic state in negotiating national interests and regional stability on the global stage.

Key word: Rohingya Refugees, Self vs. Other, Media Framing, The Jakarta Post, Critical Discourse Analysis

PENDAHULUAN

Isu pengungsi Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara dalam dua dekade terakhir (Awny et al., 2019; Contesa & Sahide, 2024; Liputo et al., 2018). Sejak pengungsian massal akibat kekerasan di Rakhine State, Myanmar, ratusan ribu pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia (Afandi et al., 2024; Raharjo, 2024). Fenomena ini tidak hanya menyangkut persoalan kemanusiaan, tetapi juga membentuk wacana publik yang diproduksi serta direproduksi melalui media massa.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik, memengaruhi opini politik, dan bahkan memberi tekanan terhadap kebijakan negara (Couvering, 2003). Media tidak semata-mata berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena konstruksi identitas menentukan siapa yang diposisikan sebagai *self* (kita) dan siapa yang ditempatkan sebagai *others* (mereka) (Neumann, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa media berperan aktif dalam membentuk realitas sosial dan politik internasional melalui wacana yang diproduksinya. Dengan mengatur cara suatu peristiwa dikisahkan dan pihak mana yang diberi suara, media dapat memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang ada.

Konteks Indonesia juga menarik karena meskipun bukan negara penandatangan Konvensi 1951 tentang Pengungsi (Gunawan et al., 2024; Lathifah et al., 2025), Indonesia kerap menjadi lokasi transit penting bagi Rohingya. UNHCR melaporkan adanya lonjakan kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut ke Aceh sejak tahun 2023, dengan sekitar 2.500 orang tiba dalam satu tahun. Angka ini

menunjukkan peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan kedatangan selama delapan tahun sebelumnya. Dalam situasi ini,

pemberitaan Jakarta Post menjadi signifikan karena menghadirkan sudut pandang yang mempertemukan perspektif domestik Indonesia dengan dinamika regional dan internasional.

Selama ini, penelitian tentang media terhadap pengungsi Rohingya banyak berfokus pada aspek representasi perspektif media dan tekanan politik. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa sentimen berita terkait Rohingya didominasi oleh nada negatif. Hal ini konsisten terjadi di berbagai media internasional yang diteliti (Al-Zaman & Rashid, 2024). Penelitian lain menunjukkan adanya bahwa *framing* terkait pemberitaan pengungsi Rohingya oleh CNN dan Kompas memiliki narasi yang berbeda, menunjukkan setiap media membangun konstruksi moral dan solusi yang berbeda. Di sisi lain, ada juga penelitian yang mengungkap bahwa Media arus utama (koran/TV) terlalu banyak dikendalikan oleh kepentingan politik sehingga gagal menunjukkan fakta penindasan yang sebenarnya, sementara media baru menjadi ruang di mana narasi mengalir lebih bebas namun cenderung seragam (Rahim & Zaman Khan, 2021).

Adapula penelitian yang menemukan bahwa adanya penerimaan pengungsi Rohingya secara moral dan politik di Indonesia dikarenakan, tanggung jawab internasional yang didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), namun juga penolakan dikarenakan Indonesia tidak memiliki kewajiban menampung pengungsi Rohingya karena karena bukan merupakan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 (Gunawan et al., 2024).

Penelitian lain juga menegaskan bahwa peran media sangat besar dalam f pergeseran persepsi masyarakat Aceh dari menerima (2015) menjadi menolak (2023-2024) pengungsi Rohingya. Penolakan ini dikonstruksi melalui narasi yang membingkai isu Rohingya sebagai ancaman keamanan nasional, masalah legalitas, serta beban sosial-ekonomi (Munirah et al., 2025).

Sementara itu, kajian mengenai konstruksi identitas dan proses pembentukan “*self*” dan “*other*” dalam pemberitaan tentang Rohingya, khususnya dalam konteks Indonesia, masih jarang dilakukan. Padahal, dalam perspektif konstruktivisme, identitas bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan praktik diskursif, termasuk melalui media (Contesa & Sahide, 2024). Pemberitaan media berperan penting dalam mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai bagian dari “*kita*” (*self*) yang beradab, berempati, dan bermoral dan siapa yang dikategorikan sebagai “*mereka*” (*other*) yang asing, berbahaya, atau berbeda secara budaya. Dengan kata lain, media tidak hanya melaporkan peristiwa kemanusiaan, tetapi juga memproduksi batas-batas moral dan politik tentang siapa yang pantas menerima solidaritas dan siapa yang dikecualikan darinya.

Konstruksi identitas seperti ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara publik, lembaga negara, maupun komunitas lokal merespons isu kemanusiaan (Afandi et al., 2024; Jannah & Zamziba, 2025; Raharjo, 2024). Ketika media membingkai pengungsi sebagai *other* yang mengancam stabilitas sosial, budaya, atau ekonomi, hal itu dapat menurunkan empati publik dan memperkuat wacana eksklusifitas nasional. Sebaliknya, ketika media menempatkan mereka sebagai korban ketidakadilan dan bagian dari komunitas kemanusiaan global, narasi tersebut dapat memperluas solidaritas dan memperkuat tekanan moral terhadap negara untuk bertindak. Dalam konteks ini, media berfungsi bukan sekadar sebagai saluran informasi, tetapi sebagai arena pembentukan makna dan reproduksi kekuasaan simbolik yang berpengaruh terhadap kebijakan dan sikap sosial terhadap pengungsi.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa wacana kemanusiaan yang diartikulasikan melalui media sering kali tidak sepenuhnya netral. Di balik narasi solidaritas dan moralitas global, terdapat relasi kekuasaan yang merefleksikan posisi politik dan

kepentingan nasional (Greussing & Boomgaarden, 2017). Dalam konteks ini, pemberitaan tentang pengungsi Rohingya juga dapat dibaca sebagai bentuk *politics of representation* yakni bagaimana bahasa kemanusiaan digunakan untuk menegosiasikan posisi Indonesia di antara tekanan moral internasional dan kebutuhan menjaga citra domestik. Dengan demikian, analisis terhadap konstruksi identitas dalam liputan *Jakarta Post* tidak hanya mengungkap bagaimana “*self*” dan “*other*” dibentuk, tetapi juga bagaimana wacana kemanusiaan dapat berfungsi sebagai strategi simbolik dalam dinamika kekuasaan global.

Kerangka *self and others* ini relevan untuk memahami bagaimana Rohingya dibingkai dalam konteks kemanusiaan dan politik kawasan. Berbeda dengan media lokal yang lebih menekankan dinamika masyarakat di tingkat daerah, *Jakarta Post* memiliki posisi yang unik karena merupakan media berbahasa Inggris dengan jangkauan audiens internasional. Liputannya tidak hanya mengangkat isu Rohingya di Indonesia, tetapi juga memuat narasi terkait negara-negara lain seperti Myanmar, Bangladesh, dan Malaysia. Hal ini menjadikan *Jakarta Post* bukan sekadar media nasional, melainkan juga kanal yang menghubungkan isu domestik Indonesia dengan wacana global.

Pemilihan *Jakarta Post* sebagai objek penelitian menjadi signifikan karena posisinya sebagai media berbahasa Inggris yang menempati ruang di antara media nasional dan internasional. Sebagai media yang ditujukan kepada audiens global, *Jakarta Post* tidak hanya merepresentasikan pandangan domestik Indonesia, tetapi juga menegosiasikan citra Indonesia di hadapan komunitas internasional. Pemberitaannya tentang pengungsi Rohingya dapat dibaca sebagai praktik diplomasi simbolik yakni upaya membentuk persepsi global mengenai komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas transnasional. Dengan demikian, analisis terhadap *Jakarta Post* tidak hanya penting untuk memahami bagaimana Rohingya dikonstruksikan sebagai “*other*”, tetapi juga bagaimana Indonesia memosisikan dirinya sebagai “*self*” yang berperan dalam tata moral global.

Kerangka teoretis analisis penelitian ini mengacu pada konsep *self and other* yang dikemukakan oleh Iver B. Neumann (1996)

dalam tulisannya di *European Journal of International Relations*. Neumann berangkat dari identitas dalam hubungan internasional tidak pernah hadir secara otonom, melainkan selalu didefinisikan melalui keberadaan “yang lain” (Neumann, 1996). Dengan kata lain, *self* dibangun dan dipahami lewat proses diferensiasi dan negasi terhadap *other*. Proses ini bukan sekadar refleksi objektif, melainkan hasil konstruksi diskursif yang berlangsung dalam ruang sosial, politik, dan kultural (Paipais, 2011). Karena itu, memahami relasi internasional berarti juga memahami bagaimana aktor, baik negara maupun masyarakat, mendefinisikan dirinya dalam kaitan dengan pihak luar, karena hal ini menunjukkan bahwa pembentukan identitas internasional bersifat relasional dan performatif.

Identitas internasional kerap diartikulasikan melalui pembedaan terhadap pihak lain sehingga ada batas antara “kita” dan “mereka” (Tsygankov, 2008). Dengan demikian, relasi kekuasaan dalam sistem internasional turut membentuk wacana identitas yang menentukan bagaimana suatu aktor memaknai posisi dan perannya di dunia internasional. Neumann menekankan bahwa pembentukan identitas melalui *self/other* bukanlah proses netral, melainkan sarat dengan kekuasaan (Rumelili, 2004).

Oposisi identitas sering kali dilekatkan pada kategorisasi biner, seperti modern-tradisional, sipil-barbar, atau korban-ancaman (Bach, 1999). Proses ini menciptakan hierarki simbolik yang dapat memperkuat posisi *self* sekaligus memarginalkan *other*. Dalam konteks internasional, praktik representasi semacam ini kerap ditemukan dalam politik luar negeri, wacana keamanan, maupun media massa (Nordin & Smith, 2019). Di sinilah pentingnya melihat bagaimana media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga membentuknya melalui bahasa, narasi, dan framing yang memproduksi *othering*.

Kerangka ini relevan untuk menelaah representasi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dengan demikian, analisis *self and other* membuka ruang untuk melihat dinamika ganda ini tentang bagaimana identitas Indonesia ditegaskan, sekaligus bagaimana “yang lain” dikonstruksi sebagai objek kebijakan maupun opini publik. Dengan menggunakan kerangka Neumann, penelitian ini menelaah bagaimana

wacana media berfungsi dalam membentuk identitas kolektif. Pendekatan ini juga memperlihatkan posisi Indonesia di antara nilai-nilai kemanusiaan global dan tantangan domestik, sekaligus menunjukkan bagaimana isu pengungsi Rohingya digunakan untuk memperkuat atau mempertanyakan narasi tentang siapa “kita” sebagai bangsa. Dengan demikian, kerangka *self and other* menjadi lensa kritis untuk memahami relasi antara representasi media, konstruksi identitas nasional, dan dinamika internasional yang menyertainya.

Analisis *self* vs. *others* antara masyarakat Indonesia dan pengungsi Rohingya dapat dipahami melalui tiga jenis frame yaitu semantic, cognitive, dan communicative (Sullivan, 2023). *Semantic frames* menekankan makna kata dan ungkapan dalam narasi, misalnya istilah *refugee*, *aid*, atau *welcome*, yang membentuk representasi Indonesia sebagai *self* dan Rohingya sebagai *other*.

Cognitive frames mencakup pengetahuan dan asumsi yang dimiliki masyarakat, seperti identitas sebagai *global citizen* yang peduli kemanusiaan, atau persepsi pengungsi Rohingya sebagai *victim* yang membutuhkan perlindungan, yang memengaruhi sikap dan perilaku terhadap mereka. Selanjutnya, *communicative frames* muncul ketika pengetahuan dan makna tersebut dikomunikasikan melalui media atau sosial media, sehingga persepsi *self* (Indonesia) dan *other* (Rohingya) diperkuat melalui narasi, visual, maupun repetisi pesan. Dengan demikian, interaksi ketiga level frame ini membentuk cara masyarakat memahami dan menanggapi pengungsi Rohingya dalam konteks sosial dan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) sebagai metode utama untuk mengkaji konstruksi wacana *The Jakarta Post* mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia. CDA dipilih karena mampu menyingkap keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang bekerja di balik narasi media (Fairclough & Scholz, 2020). Dalam perspektif Fairclough, wacana media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga merupakan praktik sosial yang memproduksi makna serta memperkuat atau menantang relasi kekuasaan tertentu (Poole, 2010). Pendekatan ini

relevan karena isu pengungsi Rohingya berada di persimpangan antara politik domestik, kemanusiaan global, dan diplomasi internasional, sehingga media memainkan peran strategis dalam membentuk citra dan posisi Indonesia di mata dunia.

Kerangka teoritik *self* dan *other* dari Iver B. Neumann (1996) digunakan untuk menelusuri bagaimana *The Jakarta Post* membangun identitas Indonesia dalam hubungannya dengan pengungsi Rohingya. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengidentifikasi bagaimana media mengartikulasikan perbedaan antara “kita” yaitu Indonesia yang beradab, empatik, dan moral dan “mereka” yaitu Rohingya yang dikonstruksikan sebagai korban, beban, atau ancaman. Dengan demikian, CDA tidak hanya mengkaji struktur teks, tetapi juga bagaimana bahasa berita berfungsi sebagai arena politik representasi dan negosiasi identitas dalam konteks kekuasaan global (Almasi Moghaddam, 2024; Dhihyah et al., 2025).

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari enam artikel daring *The Jakarta Post* yang membahas isu Rohingya dalam periode 2020-2025. Seluruh artikel dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan lonjakan kedatangan pengungsi ke Aceh serta keterkaitan dengan diplomasi kemanusiaan Indonesia (Subria Mamis et al., 2023). Keenam artikel tersebut mewakili variasi tema dan waktu pemberitaan, yakni:

1. “*Fleeing Myanmar, Rohingya refugees recall horror of war*” (26 Desember 2024),
2. “*Six dead as boat carrying nearly 100 Rohingya arrives in Aceh*” (30 Oktober 2024),
3. “*Rohingya refugees blocked from landing in Aceh*” (29 Januari 2025),
4. “*Rohingya refugees flee shelter in East Aceh*” (4 November 2024),
5. “*Indonesia, Australia Explore Solution to Rohingya Refugee Crisis under Bali Process*” (2020), dan
6. “*Indonesia appeals for end to Rohingya crisis*” (2020).

Pemilihan keenam teks ini didasarkan pada tiga pertimbangan yaitu (1) keterwakilan temporal dari 2020 hingga 2025 untuk menangkap dinamika wacana. Rentang waktu ini dipilih untuk melakukan analisis longitudinal guna menangkap kesinambungan dan perubahan

wacana *The Jakarta Post*. Hal ini memungkinkan peneliti membandingkan bagaimana media membingkai Rohingya pada fase diplomasi regional (2020) dibandingkan dengan fase krisis kemanusiaan dan penolakan sosial di tingkat domestik yang meningkat pada periode 2024-2025, (2) variasi konteks isu, dari tragedi kemanusiaan di laut hingga diplomasi regional, dan (3) posisi editorial *The Jakarta Post* sebagai media berbahasa Inggris yang menjembatani audiens nasional dan internasional. Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui pencarian arsip daring di situs resmi *The Jakarta Post*. Setiap artikel kemudian ditranskripsi dan dianalisis secara mendalam menggunakan tiga level analisis wacana menurut Fairclough (1995):

1. Level teks, meliputi analisis struktur bahasa, pilihan diksi, metafora, dan penyusunan narasi.
2. Level praktik wacana, yaitu bagaimana teks mengorganisasi makna, menentukan aktor dominan, dan membingkai peran Indonesia serta Rohingya dalam konflik dan kemanusiaan;
3. Level praktik sosial, yaitu penafsiran terhadap posisi ideologis media dan kaitannya dengan kebijakan luar negeri serta citra moral (Dhihyah et al., 2025)

Melalui CDA, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana *The Jakarta Post* menarasikan pengungsi Rohingya sebagai bagian dari wacana kemanusiaan dan identitas nasional. Analisis ini diharapkan dapat memperlihatkan pola framing, strategi representasi, serta ideologi yang bekerja di balik pemberitaan, sekaligus memberikan pemahaman kritis mengenai bagaimana media berbahasa Inggris di Indonesia berperan dalam membentuk citra moral negara dalam tata politik global.

Selain itu, Untuk memperkuat kedalaman analisis di level teks dan wacana, penelitian ini juga mengacu pada kerangka *three levels of framing* yang mencakup analisis terhadap (1) *surface framing* pada struktur bahasa dan pilihan diksi, (2) *thematic framing* pada organisasi naratif dan penentuan aktor, serta (3) *deep framing* pada nilai-nilai ideologis (Sullivan, 2023). Pendekatan ini digunakan secara komplementer dengan tiga level analisis wacana Fairclough (1995), guna

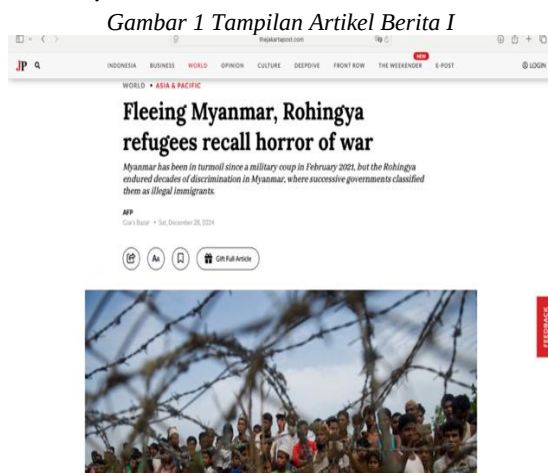
menyingkap bagaimana praktik bahasa media beroperasi dalam membentuk representasi kemanusiaan dan identitas nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis naratif terhadap pemberitaan *The Jakarta Post* periode 2020-2025, ditemukan tiga pola utama representasi pengungsi Rohingya antara lain adalah sebagai korban kemanusiaan, sebagai beban bagi Indonesia, dan sebagai isu diplomasi internasional. Ketiga pola ini menunjukkan bagaimana media berperan dalam membingkai identitas Rohingya sebagai *others*, sekaligus memposisikan Indonesia dalam relasi yang berbeda-baik sebagai pihak yang berempati, yang terbebani, maupun yang berperan aktif di panggung internasional.

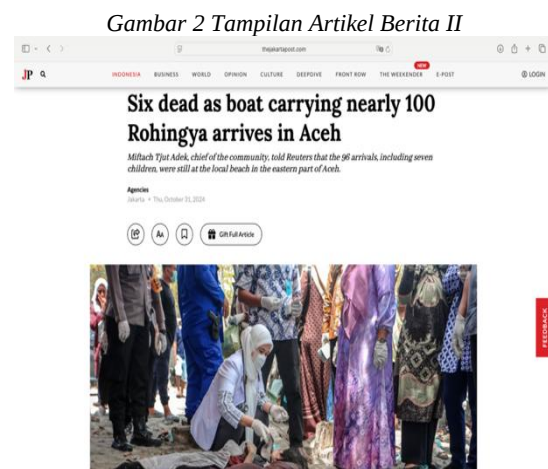
Rohingya sebagai Korban Kemanusiaan

Dalam narasi *The Jakarta Post*, pengungsi Rohingya secara konsisten dikonstruksikan sebagai Korban Kemanusiaan melalui narasi yang menekankan ketidakberdayaan dan penderitaan ekstrem. Pada level teks, penggunaan diksi yang sarat akan beban emosional seperti "*horror of war*" dan "*harrowing tales*" tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan fakta, tetapi juga menciptakan gambaran trauma yang memaksa pembaca untuk mengabaikan penilaian politik dan beralih pada empati kemanusiaan. Penggambaran sarana pelarian menggunakan metafora "*rickety boats*" (kapal reot) semakin mempertegas posisi Rohingya sebagai kelompok yang berada di titik bawah eksistensial, di mana mereka harus bertaruh nyawa di laut demi menghindari maut di darat



Sumber: The Jakarta Post Website, 2024

Pada level praktik wacana, media membingkai pengungsi sebagai aktor pasif yang identitasnya ditentukan oleh tindakan pihak lain. Mereka adalah subjek yang "didiskriminasi," "diusir," dan "tidak diakui" oleh negara asalnya. Framing ini sangat strategis karena berfungsi sebagai legitimasi moral atas kehadiran mereka di Indonesia atau Bangladesh. Dengan menonjolkan status "*stateless*" (tanpa kewarganegaraan), media menutup celah bagi narasi yang mencoba mengategorikan mereka sebagai migran ekonomi ilegal, pengungsi Rohingya juga digambarkan tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyambung hidup.



Sumber: The Jakarta Post Website, 2024

Secara lebih mendalam pada level praktik sosial, konstruksi korban ini mencerminkan benturan ideologi antara prinsip kemanusiaan universal dengan kedaulatan negara yang kaku. *The Jakarta Post* menggunakan sudut pandang media berbahasa Inggris yang berorientasi global untuk mengkritik kebijakan eksklusi Myanmar yang melabeli Rohingya sebagai "*foreign interlopers*" (penyusup asing). Melalui berita ini, media berperan sebagai agen moral yang menuntut tanggung jawab internasional.

Tabel 2 Temuan Analisis CDA Berita I & II

No	Bahasa yang di-Highlight	Level teks, Framing & Sosial	Penempatan Self & Others
1	"Horror of war"	Emosional/Trauma, Legitimasi pengungsian, Kemanusiaan universal.	Others sebagai penyintas
2	"Illegal immigrants"	Administratif, Eksklusi oleh	Others sebagai entitas asing

Self vs. Other: Media Framing Jakarta Post Terhadap Pengungsi Rohingya (Salsabila Humaira, Siti Aliyuna Pratisti, Yulius Purwadi Hermawan, Nurul Husna)

No	Bahasa yang di-Highlight	Level teks, Framing & Sosial	Penempatan Self & Others
		negara, Kedaulatan & Hak Asasi	
3	"Stateless Muslim"	Identitas/Hukum, Kerentanan ganda, Solidaritas lintas agama	Others yang terisolasi
4	"Rickety boats"	Metafora kerapuhan, Keputusan ekstrem, jalur migrasi tidak aman	Others yang terancam
5	"Foreign interlopers"	Dehumanisasi, Stigma etnis	Others sebagai penyusup
6	"Six dead... Acehnese beach"	Tragedi fisik, Krisis	Others sebagai kemalangan
7	"Risk of famine"	Biologis/Dasar, Kegagalan sistemik, Kritik kebijakan Myanmar	Others kelaparan
8	"Escaping violence"	Aksi penyelamatan diri, suaka politik	Others sebagai pencari suaka

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Dalam perspektif *Self* dan *Others*, narasi ini menciptakan pemisahan yang jelas namun simpatik. "Mereka" (*Others/Pengungsi Rohingya*) ditempatkan sebagai manusia yang kehilangan martabat, harta, dan perlindungan hukum akibat kekejaman perang. Sebaliknya, Indonesia dikonstruksikan sebagai bagian dari "Kita" (*Self*) yang beradab dan bermoral, yang diuji kapasitas empatinya melalui tragedi yang terjadi di depan mata, seperti kematian pengungsi di pantai Aceh. Dengan demikian, wacana korban kemanusiaan ini bertujuan untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara yang tetap mengedepankan nilai-nilai moral di tengah krisis politik regional yang kompleks.

Rohingya sebagai Beban dan Tantangan

Gambar 3 Tampilan Artikel Berita III



Sumber: The Jakarta Post Website, 2025

Berdasarkan analisis terhadap Berita III dan IV, *The Jakarta Post* menampilkan pergeseran naratif yang signifikan, di mana pengungsi Rohingya tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai tantangan kedaulatan dan beban sosio-politik. Pada level teks, penggunaan istilah seperti "*deluge*" (banjir) dan "*blocked*" (dihadang) menciptakan representasi visual mengenai situasi krisis yang mengancam stabilitas lokal.

Narasi mengenai pengungsi yang "*deliberately damaged*" (sengaja merusak) kapal mereka sendiri, teks tersebut mereproduksi wacana yang menempatkan agensi pengungsi dalam posisi diskursif negatif, di mana kondisi keputusan mereka dikonstruksikan sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan negara penerima.

Gambar 4 Tampilan Artikel Berita IV



Sumber: The Jakarta Post Website, 2024

Pada level praktik wacana, terdapat upaya sistematis untuk membingkai kehadiran Rohingya dalam konteks kriminalitas dan kerentanan keamanan. Penyebutan "*human trafficking mafia*" berfungsi untuk mendelegitimasi status pencari suaka mereka, menggeser fokus wacana dari kewajiban kemanusiaan menjadi masalah penegakan hukum perbatasan. Selain itu, narasi mengenai pengungsi yang melarikan diri dari tempat penampungan sementara (*fleeing shelters*) memperkuat stigma bahwa kelompok ini adalah subjek yang tidak dapat diprediksi dan sulit dikendalikan oleh otoritas domestik. Hal ini menciptakan pembenaran bagi tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh petugas keamanan di lapangan.

Tabel 2 Temuan Analisis CDA Berita III & IV

No	Bahasa yang di-Highlight	Level Teks, Framing, & Praktik Sosial	Penempatan Self & Others	No	Bahasa yang di-Highlight	Level Teks, Framing, & Praktik Sosial	Penempatan Self & Others
1	"Blocked from landing," "prevented from disembarking."	Framing sekuritisasi yang menempatkan pengungsi sebagai entitas yang harus dipisah demi ketertiban umum.	Self: Penjaga ketertiban; Others: Entitas yang mengganggu.				
2	"Concerns that they might blend in... and escape."	Wacana pengawasan yang menganggap pengungsi sebagai subjek yang berpotensi melarikan diri dan mengancam keamanan lokal.	Self: Pihak yang terancam; Others: Objek yang harus diawasi.				
3	"Boat was deliberately damaged by them."	Framing yang menonjolkan aspek manipulatif pengungsi untuk memaksa suka, menciptakan citra "tantangan perilaku".	Self: Pihak yang dikonfrontasi; Others: Aktor yang destruktif.				
4	"Not a signatory... cannot be compelled to take in."	Praktik sosial yang menegaskan kedaulatan hukum Indonesia untuk menolak beban tanggung jawab internasional.	Self: Negara berdaulat; Others: Beban eksternal yang dipaksakan.				
5	"Share the burden and resettle."	Wacana diplomasi yang mengalihkan tanggung jawab kemanusiaan sebagai beban kolektif regional yang berat.	Self: Pihak yang kelebihan beban; Others: masalah.				
6	"Patience has been tested," "consume scarce resources."	Framing kejenuhan sosial (<i>fatigue</i>) yang menghubungkan kehadiran pengungsi dengan kelangkaan ekonomi domestik.	Self: Warga yang dirugikan; Others: Beban ekonomi.				
7	"Deluge of arrivals," "cyclical pattern."	Metafora bencana alam ("banjir") yang menggambarkan kedatangan sebagai ancaman besar yang tak terkendali.	Self: Korban "bencana" migrasi; Others: Kekuatan yang membanjiri.				
8	"Human trafficking mafia activity."	Kriminalisasi isu migrasi yang mengalihkan fokus dari kebutuhan perlindungan ke arah penegakan hukum pidana.	Self: Korban sindikat; Others: Bagian dari aktivitas ilegal.				
9	"Flee their temporary shelter," "searching for the group."	Narasi ketidakteraturan yang menempatkan pengungsi sebagai subjek yang tidak patuh hukum dan	Self: Otoritas yang dikhianati; Others: Buronan/pihak tidak kooperatif.				

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Dalam level praktik sosial, teks tersebut mencerminkan posisi ideologis Indonesia yang bersandar pada fakta bahwa negara ini "*is not a signatory*" (bukan penandatangan) Konvensi Pengungsi 1951. Wacana ini digunakan untuk membangun argumen hukum bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban absolut dan berhak untuk menolak "beban" tersebut. Munculnya narasi tentang "*scarce resources*" (sumber daya yang langka) menunjukkan adanya gesekan antara identitas religius (solidaritas sesama Muslim) dengan kepentingan nasional pragmatis. Sentimen warga lokal yang mulai kehilangan kesabaran digunakan media untuk menunjukkan bahwa batas toleransi sosial telah tercapai.

Secara keseluruhan, dalam kerangka *Self* dan *Others*, media mengonstruksikan Indonesia (*Self*) sebagai entitas yang telah cukup murah hati namun kini berada dalam posisi terancam oleh eksploitasi sindikat perdagangan orang dan ketidakteraturan pengungsi. Sebaliknya, Rohingya (*Others*) dikonstruksikan sebagai beban struktural yang memicu konflik horizontal dan menguras sumber daya domestik. Wacana ini memberikan sinyal kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia menuntut pembagian beban (*burden sharing*) yang lebih adil, sekaligus memberikan pembenaran domestik atas kebijakan penolakan dan pengawasan ketat terhadap arus pengungsi di masa depan.

Rohingya sebagai Isu Diplomasi dan Politik Internasional

Dalam Berita V dan VI, *The Jakarta Post* menggeser fokus narasi dari sekadar bantuan kemanusiaan menjadi sebuah diskursus politik internasional dan keamanan transnasional. Pada level teks, penggunaan istilah-istilah seperti "*Bali Process*," "*joint communiqué*," dan "*repatriation*" menunjukkan upaya media untuk mengangkat derajat isu ini ke dalam level birokrasi dan institusional. Isu Rohingya tidak lagi direpresentasikan sebagai tragedi kemanusiaan yang terisolasi, melainkan

**Self vs. Other: Media Framing Jakarta Post Terhadap Pengungsi Rohingya
(Salsabila Humaira, Siti Aliyuna Pratisti, Yulius Purwadi Hermawan, Nurul Husna)**

sebagai fenomena "*maritime migration*" yang memerlukan koordinasi teknis tingkat tinggi antara kedaulatan negara-negara di kawasan.

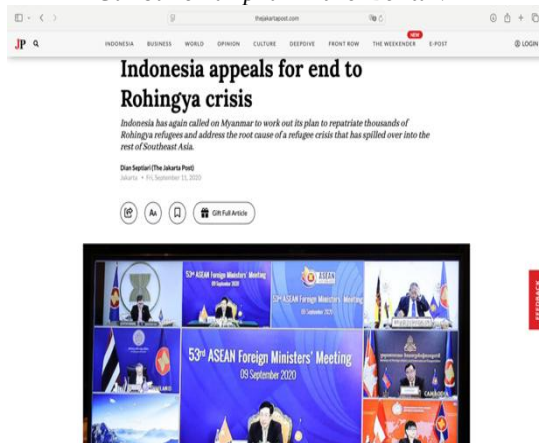
Gambar 5 Tampilan Artikel Berita V



Sumber: The Jakarta Post Website, 2020

Pada level praktik wacana, terdapat strategi sekuritisasi yang sangat kuat, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Media mengutip pejabat negara yang memvalidasi penolakan pengungsi dengan dalih "*coronavirus concerns*". Framing ini secara efektif mengubah identitas pengungsi dari pencari suaka yang rentan menjadi potensi risiko kesehatan yang melegitimasi penguatan kontrol perbatasan.

Gambar 6 Tampilan Artikel Berita VI



Sumber: The Jakarta Post Website, 2020

Selain itu, penekanan pada "*root causes*" (akar masalah) di Negara Bagian Rakhine berfungsi sebagai instrumen diplomatik untuk mengalihkan beban tanggung jawab dari negara penerima (*littoral states*) kembali kepada Myanmar. Hal ini

mencerminkan dinamika kekuasaan di dalam ASEAN, di mana Indonesia berusaha menggunakan mekanisme multilateral untuk menekan Myanmar tanpa melanggar prinsip *non-interference* secara langsung.

Tabel 3 Temuan Analisis CDA Berita V & VI

No	Bahasa yang di-Highlight	Level Teks, Framing, & Sosial	Penempatan Self & Others
1	"Bali Process framework," "mechanism for policy dialogue."	Institusionalisasi isu migrasi ke dalam kerangka kerja formal antara Indonesia dan Australia untuk mengelola krisis.	Self: Ko-ketua/Inisiator; Others: Mitra dialog & anggota regional.
2	"Address the root cause of the problem."	Framing kausalitas yang menempatkan akar permasalahan pada kebijakan internal Myanmar, bukan pada penampungan.	Self: Pemberi solusi; Others: Myanmar (penyebab isu).
3	"Voluntary, safe and dignified return (repatriation)."	Penggunaan standar normatif internasional untuk melegitimasi pengembalian pengungsi ke wilayah asal.	Self: Penegak norma; Others: Rohingya (subjek repatriasi).
4	"Regional response," "collective stance."	Wacana multilateralisme yang menekankan bahwa beban pengungsi tidak boleh ditanggung secara unilateral oleh Indonesia.	Self: Bagian dari kolektif ASEAN; Others: Dunia internasional.
5	"Citing coronavirus concerns... tighten border controls."	Sekuritisasi kesehatan; menggunakan pandemi sebagai pembenaran diplomatik untuk pembatasan masuknya pengungsi.	Self: Pelindung warga negara; Others: Ancaman kesehatan luar.
6	"Transnational crimes," "people smuggling and trafficking."	Reframing isu kemanusiaan menjadi isu kriminalitas lintas batas untuk mengaktifkan mekanisme penegakan hukum regional.	Self: Penegak hukum; Others: Sindikat kriminal & korban.
7	"Jeopardize the security and the stability."	Framing sekuritisasi regional yang menempatkan kegagalan penyelesaian krisis di Rakhine sebagai	Self: Penjaga stabilitas; Others: Myanmar (sumber instabilitas).

No	Bahasa yang di-Highlight	Level Teks, Framing, & Sosial	Penempatan Self & Others
ancaman stabilitas ASEAN.			
8	"Sophisticated methods of trafficking," "10,000 ringgit."	Narasi teknis mengenai nilai ekonomi migrasi ilegal untuk menonjolkan aspek eksploitasi dan penyelundupan.	Self: Pengawas perbatasan; Others: Penyelundup & objek komoditas.

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Secara praktik sosial, wacana ini memperlihatkan bagaimana isu kemanusiaan dikriminalisasi melalui label "*transnational crime*" (kejahatan lintas batas). Dengan membingkai migrasi Rohingya sebagai hasil dari "*human trafficking mafia*", negara-negara anggota *Bali Process* memiliki alasan hukum untuk memprioritaskan keamanan perbatasan dan penegakan hukum pidana di atas kewajiban suaka. Narasi mengenai biaya penyelundupan (10.000 ringgit) memperkuat persepsi bahwa krisis ini adalah aktivitas ilegal yang mengancam stabilitas regional, sehingga memerlukan respons operasional yang darurat, bukan sekadar dialog kebijakan.

Dalam perspektif *Self* dan *Others*, Indonesia dan Australia dikonstruksikan sebagai "*Self*" yang bertanggung jawab dan proaktif dalam mencari solusi institusional, sementara Myanmar secara konsisten ditempatkan sebagai "*Others*" yang bertanggung jawab atas instabilitas kawasan. Di sisi lain, Rohingya tetap berada pada posisi "*Others*" yang terpinggirkan. Pengungsi Rohingya hadir dalam teks bukan sebagai subjek politik yang memiliki hak suara, namun mereka justru hanya dianggap sebagai faktor yang mengancam keamanan dan sasaran rencana pemulangan paksa. Analisis ini mengungkap bahwa dalam arena diplomasi internasional, identitas pengungsi sering kali dinegosiasikan ulang demi kepentingan stabilitas nasional dan integritas perbatasan negara.

Dampak Framing The Jakarta Post

Framing awal yang menempatkan Rohingya sebagai korban kemanusiaan melalui diksi seperti *horror of war* dapat membangun legitimasi moral bagi kehadiran pengungsi Rohingya. Namun, dampak dari pergeseran narasi menuju beban dan tantangan sangatlah

signifikan, dimana penggunaan metafora bencana seperti *deluge* (banjir) dan label kriminalitas seperti *trafficking mafia* secara efektif mengubah persepsi publik dari simpati menjadi kecemasan. Dampak psikologisnya adalah munculnya kejenuhan sosial (*social fatigue*) di tingkat lokal (khususnya Aceh), di mana masyarakat tidak lagi melihat pengungsi sebagai individu yang menderita, melainkan sebagai beban sumber daya dan ancaman keamanan. Hal ini memberikan dukungan terhadap penolakan fisik di lapangan dan pengawasan ketat oleh otoritas keamanan tanpa harus merasa kehilangan martabat moral.

Dampak lainnya, *Framing* isu Rohingya sebagai masalah diplomasi internasional dan kejahatan transnasional juga memberikan dampak pada pengalihan tanggung jawab negara dari ranah kemanusiaan ke ranah birokrasi penegakan hukum. Dengan menonjolkan mekanisme seperti *Bali Process* dan isu *root causes* di Myanmar, media membantu pemerintah Indonesia untuk secara halus mengelak dari kewajiban suaka absolut dengan dalih kedaulatan hukum (status non-penandatanganan Konvensi 1951). Dampak paling krusial dari *framing* ini adalah dehumanisasi subjek, dimana pengungsi Rohingya kehilangan suara politiknya dan hanya direpresentasikan sebagai ancaman. Secara strategis, hal ini memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional untuk menuntut pembagian beban (*burden sharing*), namun di sisi lain, mempersempit ruang perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi karena mereka dianggap sebagai faktor instabilitas regional yang harus segera dipulangkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi wacana *The Jakarta Post* terhadap pengungsi Rohingya periode 2020-2025 mengalami pergeseran dinamis dari narasi kemanusiaan universal menuju narasi sekuritisasi dan beban domestik. Pada level teks, media ini awalnya membingkai Rohingya sebagai korban trauma untuk membangkitkan empati global, namun seiring meningkatnya kedatangan pengungsi di Aceh, wacana beralih pada penggunaan metafora bencana dan diksi kriminalitas seperti sindikat perdagangan orang

yang memposisikan mereka sebagai ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan perbatasan. Pergeseran ini menciptakan negosiasi identitas yang kompleks antara "Self" (Indonesia) sebagai aktor moral yang tetap memprioritaskan kedaulatan nasional karena statusnya yang bukan penandatangan Konvensi 1951, dan "Others" (Rohingya) yang terjepit dalam dilema antara kedekatan identitas agama serta persepsi sebagai beban ekonomi yang memicu kejenuhan warga lokal.

Pada level praktik sosial, wacana *The Jakarta Post* berfungsi sebagai instrumen *Soft Diplomacy* yang memperkuat posisi politik Indonesia di kawasan regional melalui mekanisme seperti *Bali Process* dan tuntutan pembagian beban (*burden sharing*) di ASEAN. *The Jakarta Post* secara strategis menyelaraskan nilai kemanusiaan global dengan tuntutan pragmatis keamanan nasional, di mana narasi kemanusiaan digunakan untuk menjaga citra moral bangsa sambil tetap mengalihkan tanggung jawab repatriasi ke negara asal demi menjaga stabilitas wilayah. Hal ini membuktikan bahwa bahasa berita tidak bersifat netral, melainkan menjadi arena negosiasi kepentingan kekuasaan di mana kepentingan nasional tetap menjadi pegangan utama. Akhirnya, representasi media ini menegaskan bahwa konstruksi krisis pengungsi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan posisi strategis negara dalam tata kelola migrasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. A., Isyroqun N, H., & Sholeh, B. (2024). Conflict and Media Framing: The Case of Detik.com News towards Rohingya Conflict. *Jurnal Transformasi Global*, 11(2), 205–221.
- Almasi Moghaddam, K. (2024). Critical discourse analysis: A review of the views of Ernesto Laclau, Chantal Mouffe and Norman Fairclough. *International Journal of Advanced Research in Humanities and Law*, 1(2), 86–90. <https://doi.org/10.63053/ijrel.16>
- Al-Zaman, M. S., & Rashid, M. H. O. (2024). Global Media Sentiments on the Rohingya Crisis: A Comparative Analysis of News Articles from Ten Countries. *Journalism and Media*, 5(3), 1098–1111. <https://doi.org/10.3390/journalmedia5030>
- 070
- Awmy, M., Lawrence, N., & Nieman, M. D. (2019). *The Rohingya refugee issue: Differences in media framing in Bangladesh and India*. Iowa State University.
- Bach, J. P. G. . (1999). *Between sovereignty and integration: German foreign policy and national identity after 1989*. Lit Verlag ; St. Martin's Press.
- Contesa, Y., & Sahide, A. (2024). Media Framing of Rohingya Muslims: A Comparative Analysis of Western, Middle Eastern, and Southeast Asian Media. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(2), 215–241. <https://doi.org/10.22515/dinika.v9i2.10065>
- Dhihiyah, D., Basid, A., & Yani, A. (2025). Resolving the Sudan Crisis: A Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough's Perspective. *Journal of Language and Literature Studies*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.36312/jolls.v5i1.2340>
- Elizabeth Van Couvering. (2003). *Media Power on the Internet: Towards a Theoretical Framework*. <http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary>,
- Fairclough, N., & Scholz, R. (2020). "Critical discourse analysis as 'dialectical reasoning': from normative critique towards action, by way of explanation." *Mots*, (122), 113–123. <https://doi.org/10.4000/mots.26320>
- Gita Lestari Liputo, Yuriewaty Pasoreh, & Nicolas Mandey. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Rohingya Pada Media Online Kompas dan CNN. *Acta Diurna*, 7(3), 1–18.
- Greussing, E., & Boomgaarden, H. G. (2017). Shifting the refugee narrative? An automated frame analysis of Europe's 2015 refugee crisis. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43(11), 1749–1774. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1282813>
- Gunawan, Y., Novendra, C. S., & Febrila, A. (2024). Indonesia's Responsibility Towards Rohingya Refugees: Analysis of the 1951 Refugee Convention. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 182–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/lji.h.v32i2.32164>

- Lathifah, E. Z., Akbar, P. I., Putra, M., Imigrasi, P., & Amrullah, D. M. (2025). Humanity vs Sovereignty: The Issue of Handling Refugees in Indonesia from an Immigration Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.52617/jlb.p.v7i1.689>
- Munirah, Jannah, R., Amalia, & Zamziba, M. N. F. (2025). The Power of Social Media: A Narrative Analysis of Rohingya Refugee Rejection on TikTok. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 19(1), 2548–9496. <https://doi.org/10.24090.komunika.v18i1.13119>
- Neumann, I. B. (1996a). Self and other in international relations. *European Journal of International Relations*, 2(2), 139–174. <https://doi.org/10.1177/1354066196002002001>
- Neumann, I. B. (1996b). Self and other in international relations. *European Journal of International Relations*, 2(2), 139–174. <https://doi.org/10.1177/1354066196002002001>
- Nordin, A. H. M., & Smith, G. M. (2019). Relating self and other in Chinese and Western thought. *Cambridge Review of International Affairs*, 32(5), 636–653. <https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1576160>
- Paipais, V. (2011). Self and other in critical international theory: Assimilation, incommensurability and the paradox of critique. *Review of International Studies*, 37(1), 121–140. <https://doi.org/10.1017/S0260210510000288>
- Poole, B. (2010). Commitment and criticality: Fairclough's Critical Discourse Analysis evaluated. *International Journal Applied Linguistics*, 20, 137–155.
- Raharjo, W. A. (2024). Investigating Conflict-Sensitive Journalism: Aljazeera News Report on the 2017 Rohingya Crisis in Myanmar. *Glocal Society Journal*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/10.31947/gs.v1i1.36266>
- Rahim, A., & Zaman Khan, S. (2021). Representation of the Rohingyas in Media and New Media: Narrative, Analysis, and Re-thinking. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 05(12), 838–842. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2021.51246>
- Rumelili, B. (2004). Constructing identity and relating to difference: Understanding the EU's mode of differentiation. *Review of International Studies*, 30(1), 27–47. <https://doi.org/10.1017/S0260210504005819>
- Subria Mamis, Ahmad Sultra Rustan, Sri Hadijah Arnus, & Hasan Basri. (2023). Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya di Indonesia: Perspektif UNHCR dan Otoritas Aceh dalam Sorotan Kritis. *WARDAH Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 24(2), 137–163. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7091784/harapan-jk-agar->
- Sullivan, K. (2023). Three levels of framing. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science*, 14(5), 1–13. <https://doi.org/10.1002/wcs.1651>
- Tsygankov, A. P. (2008). Self and Other in International Relations Theory: Learning from Russian Civilizational Debates 1. *International Studies Review*, 762–775.